

## MEMBANGUN PEMBELAJARAN DEMOKRATIS BERWAWASAN MULTIKULTURAL

**Nur Laili Fitriyah**

Dosen Tetap Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang

### **Abstract**

Negative phenomena which are found in this country, especially among students because of errors on the meaning of democracy must be followed up in order to be able to attain the education and return to the goal of producing bright young generation, democratic and not to ignore the environment around them and the diversity in culture and their beliefs. In order to achieve this, we a democratic learning by educators who have knowledge and awareness of freedom in proportionally meaning, awareness of diversity and multicultural in life and of course ability to implement them in learning.

**Keywords :** *Learning Democracy, Freedom, Multicultural*

### **A. Pendahuluan**

Demokrasi adalah kata yang sering didengungkan di negara kita semenjak era reformasi. Demokrasi menjadi kata kunci untuk memberikan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Di dunia politik, demokrasi di Indonesia dilaksanakan dan diwujudkan dengan menampakkan kegiatan pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan diawasi oleh lembaga independen. Bahkan dunia pun mengacungi jempol dengan keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan secara demokratis. Walaupun hasil dari pemilihan secara demokratis tersebut belum dapat kita rasakan manfaatnya hingga sekarang ini.

Dalam perkembangannya, demokrasi erat kaitannya bahkan dimaknai sebagai kebebasan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat. Berangkat dari makna tersebut, pelaksanaan demokrasi tidak hanya digunakan di dunia politik saja tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan. Misalnya di dunia ekonomi, pendidikan, media massa bahkan hiburan. Namun, makna kebebasan yang diambil dari kata demokrasi tampaknya memberi dampak cukup besar dalam kehidupan. Kebebasan yang diberikan menjadi kebebasan yang keblabasan yang tidak lagi memperhatikan hak-hak orang lain. Yang terpenting dalam hal ini adalah kebebasan tersebut dapat mengekspresikan pikiran dan keinginan dalam perspektif personal. Itu adalah

gambaran kasar yang penulis tangkap dari kesalahkaprahan dalam memaknai kata demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh, dampak dari demokrasi yang kebablasan dan tidak proporsional ini menimbulkan kekacauan di mana-mana. Timbul konflik karena perbedaan pendapat di tengah kebebasan berpendapat. Muncul keresahan-keresahan di masyarakat karena berbagai informasi dari media masa yang dengan sangat terbuka memberitakan tindak kekerasan karena kebebasan persnya. Dan masih banyak lagi kebebasan-kebebasan kebablasan yang tanpa disadari berkedok demokrasi terjadi di negeri tercinta ini.

Tidak sedikit kebebasan berkedok demokrasi tadi berujung kepada kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi di Indonesia belakangan ini mendapat perhatian hampir di semua lapisan dan golongan. Tidak hanya pemerintah yang risau dengan fenomena tersebut, masyarakat awam pun mulai merasa khawatir dengan kondisi yang terjadi. Yang lebih meresahkan lagi, tidak sedikit tindakan kekerasan yang terjadi melibatkan oknum di dunia pendidikan seperti demo anarkis, tawuran pelajar, pendidik melakukan kekerasan kepada anak didiknya, bahkan ada murid yang memukul gurunya seperti kasus yang terjadi di kota Bima Nusa Tenggara Barat, dan semua itu dapat langsung kita lihat dan saksikan melalui media massa. Kalau hal ini terus dibiarkan, entah seperti apa nasib bangsa kita nantinya.

Tampaknya kebebasan yang kebablasan telah mengikis nilai-nilai demokrasi itu sendiri. B.J. Habibie dalam bukunya mengungkapkan tentang kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kebebasan dan demokrasi telah diberi, namun euforia dan bebas berbicara dan berperilaku belum dapat diimbangi oleh kesadaran tanggung jawab dalam berperilaku yang bermoral dan beretik sesuai ajaran agama masing-masing. Nilai moral dan etik mulai ditinggalkan dan semua cara untuk mencapai sasaran-memiliki kekuasaan- dihalalkan. Ini mengindikasikan bahwa pemaknaan terhadap demokrasi sudah tidak proporsional dan jauh dari konteks yang sesungguhnya (B.J. Habibie, 2006: 415).

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perlu adanya pemaknaan yang proporsional terhadap demokrasi dan kebebasan. Bahwa demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa demokrasi adalah kebebasan yang memahami perbedaan dan hak orang lain. Bahwa demokrasi adalah kebebasan yang memahami kebebasan orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana agar pemaknaan terhadap demokrasi dan kebebasan tidak disalah artikan?

Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam makna demokratis dalam jiwa bangsa kita. Terutama kepada generasi penerus bangsa agar mereka tidak terkontaminasi oleh kebiasaan-kebiasaan negatif yang mengekspresikan "kebebasan dalam demokrasi". Wadah yang paling cocok sebagai tempat untuk menanamkan dan dan menyadarkan nilai demokrasi adalah melalui pendidikan.

## **B. Pendidikan dan Pembelajaran Demokratis**

Kesadaran untuk membenahi diri sangatlah diperlukan karena memang kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlangsung terus tanpa ada upaya untuk meluruskan kesalahkaprahan tersebut. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi, penanaman nilai-nilai perlu dilakukan sejak dini. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan untuk menindaklanjuti kondisi yang terjadi melalui pendekatan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Tentunya yang paling memegang peranan penting dalam hal ini adalah proses pembelajaran di sekolah.

Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik adalah aktor utama dalam upaya pembentukan peserta didik menjadi insan kamil. Pendidiklah yang paling sering berinteraksi dengan peserta didik. Oleh karena itu di pundak pendidiklah tugas pendidikan formal dibebankan.

Pembelajaran di sekolah sekarang ini, sesungguhnya berbeda dengan pembelajaran dahulu. Dahulu pembelajaran di sekolah berlangsung searah, di mana pendidik merupakan sentral dari kegiatan pembelajaran. Namun sekarang pembelajaran lebih diarahkan kepada interaksi aktif antara pendidik dengan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran pendidik tidak mendominasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Muhaimin Azet (2011) bahwa pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang demokratis. Sebuah proses pendidikan yang mengatur hubungan guru dan murid dapat berimbang sehingga bisa saling menyampaikan pendapat dan pikiran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, sedangkan murid hanya mendengar dan menerima apa adanya.

Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan ke depan adalah agar peserta didik menjadi insan kamil yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pembelajaran demokratis memang perlu, namun perlu dihindari adanya kesalahpahaman akan arti demokrasi itu sendiri. Jangan sampai makna demokrasi diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang menghormati dan memahami kebebasan orang lain. Hal ini perlu ditanamkan dan dijaga untuk menghindari pemaknaan yang berlebihan dan kebablasan.

Di sinilah tugas pendidik untuk mengontrol makna demokrasi yang ditanamkan kepada peserta didik. Sekolah memang sudah saatnya memberikan pembelajaran yang membebaskan yaitu pembelajaran yang demokratis kepada peserta didik, sehingga peserta tidak saja dapat menikmati kebebasan dan suasana demokratis dalam pembelajaran tetapi juga sekaligus mendapatkan pembelajaran berdemokrasi melalui kebiasaan-kebiasaan dan budaya demokrasi yang diciptakan di kelas. Namun demikian perlu diantisipasi pula bahwa peserta didik tidak boleh dibebaskan begitu saja, mereka juga harus tetap dipandu dan dijaga agar kebebasan yang diberikan tidak disalahartikan.

Upaya menciptakan pembelajaran yang demokratis, pembelajaran tidak hanya memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengungkapkan ide dan pikirannya, tetapi juga perlu kesadaran bahwa ide dan pikiran setiap orang berbeda. Seorang siswa boleh saja mengungkapkan ide atau pendapatnya tetapi di luar idenya ada ide dan pikiran siswa lain yang berbeda dengan dirinya. Kesadaran ini perlu ditanamkan kepada peserta didik bahwa di atas kebebasan yang diberikan kepada seorang individu ada perbedaan-perbedaan yang datang dari setiap individu. Memahami perbedaan ini yang mungkin belum mendapat tempat di tengah kebebasan demokrasi.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendidik yang memiliki wawasan dan kesadaran tentang keragaman, kesadaran akan kemajemukan dan pendidikan multikultural dalam kehidupan. Selain itu pendidik adalah tokoh yang digugu dan ditiru. Pendidik mestinya menjadi contoh (model) yang sedikit banyak mempengaruhi anak didiknya. Oleh karena itu, sangat perlu berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Tidak hanya dalam tingkah laku tetapi juga dalam kegiatan

pembelajarannya. Dengan begitu upaya membangun pembelajaran yang demokratis di kelas baik dalam pembelajaran, memberi contoh teladan sekaligus dalam upaya penanaman nilai-nilai demokratis kepada siswanya dapat terwujud.

### C. Internalisasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Demokratis

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural (Sulalah, 2012: 3). Dengan pendidikan multikultural diharapkan melalui lembaga pendidikan formal, dapat ditanamkan nilai-nilai saling menghargai dan toleransi terhadap segala bentuk keberagaman yang dimiliki oleh manusia kepada peserta didik.

Internalisasi pendidikan multikultural dalam pendidikan formal belum banyak dilakukan. Karena memang hal tersebut secara eksplisit belum disebutkan dalam standar nasional pendidikan yang harus dilaksanakan lembaga pendidikan. Namun sebenarnya di dalam tujuan pendidikan nasional sendiri sudah terintegrasi nilai-nilai pendidikan multikultural, hanya saja pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah di lokalnya masing-masing (Abdullah Aly, 2011: 6-7).

Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama) (Ngainun Naim dan Achmad Saiqi, 2010: 50). Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kedua definisi di atas menekankan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang berlandaskan kepada sikap saling menghormati, tulus dan toleran atas pluralitas atau perbedaan yang muncul karena keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Bahkan lebih dari itu, perbedaan yang juga muncul akibat perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan karakter, perbedaan kemampuan dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya.

Pendidikan multikultural, sebagaimana diungkapkan di atas, merupakan penanaman nilai-nilai (saling menghormati, tulus, dan toleran). Ini mengindikasikan bahwa peranan dunia pendidikan dalam upaya menginternalisasikan pendidikan multikultural kepada generasi penerus sangat tepat. Dikatakan demikian karena

pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, merupakan sarana *transfer of knowledge*, di mana di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Dalam kegiatan interaksi inilah proses penanaman nilai-nilai juga terjadi.

Penanaman nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran akan mengantarkan peserta didik kepada pembelajaran demokratis yang sejati. Di mana pembelajaran terlaksana tidak hanya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan segala ide, pendapat dan potensi yang dimilikinya tetapi juga di dalamnya ada kesadaran akan adanya kebebasan orang lain di sekitarnya yang berbeda satu sama lain dan juga memiliki hak yang sama.

#### **D. Kesesuaian Tujuan Pendidikan dengan Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural**

Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut juga diuraikan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu tercantum pada pasal 4, bahwa : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Selain itu fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, fungsi pendidikan juga dapat dilihat dalam dua perspektif. *Pertama*, secara mikro ( sempit ), pendidikan berfungsi untuk membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. *Kedua*, secara makro ( luas ), pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga Negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa.

Uraian panjang dari Undang-undang tentang pendidikan di atas jika dikaji dengan seksama semua mengarah pada pembentukan anak didik menjadi manusia seutuhnya. Tidak hanya utuh dalam keilmuannya tetapi juga dalam pembentukan nilai-nilai kemanusiaan. Dan semua itu relevan dengan konsep pendidikan multikultural, sehingga pembelajaran demokratis sejati di sekolah dapat terwujud. Apalagi di tengah kekacauan dan kekerasan yang muncul karena ketidakmampuan kita dalam menerima dan memaknai kebebasan dan perbedaan sebagai sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia. Di sinilah pentingnya pendidikan dilaksanakan dengan berlandaskan pada konsep kebebasan yang menghargai kebebasan dan perbedaan orang lain yang ada di sekitar kita.

#### **E. Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Pembelajaran Demokratis**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, pastinya setiap manusia memiliki karakteristik tersendiri. Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, dapat ditemukan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Perbedaan yang terjadi karena karakteristik setiap manusia tidak sama. Perbedaan-perbedaan antara manusia itulah yang akhirnya melahirkan keragaman.

Keragaman dapat menciptakan problema kehidupan yang berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan (Herimanto & Winarno, 2011). Hal itu sering terjadi ketika keragaman yang menghadirkan perbedaan antar manusia tersebut saling berbenturan. Selanjutnya yang timbul adalah kekacauan dan konflik.

Pendidikan multikultural menurut sejarah, muncul sebagai alternatif untuk mengatasi problem keragaman tersebut. Wacana pentingnya pendidikan multikultural khususnya di Indonesia semakin sering digemakan melalui berbagai simposium dan workshop seperti Jurnal Antropologi Indonesia Departemen Antropologi Universitas

Indonesia (2000) yang mengadakan simposium internasional di Makasar yang kemudian dilanjutkan tahun 2001 di Padang dan 2002 di Denpasar. Kemudian pada tahun 2003, Jurnal Antropologi Indonesia menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Education in Southeast Asian Nation: Sharing Experience* (Ngainun Naim dan Achmad Saiqi, 2010: 97-98).

Begitu gencarnya upaya mensosialisasikan pendidikan multikultural merupakan bukti betapa pentingnya pendidikan multikultural, terutama di masa sekarang ketika begitu banyaknya konflik yang timbul karena adanya kesalahpahaman karena perbedaan dan kesalahpengertian dalam memaknai demokrasi yang membebaskan.

#### **F. Guru Sebagai Pelaksana Utama Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural**

Begitu besar pengaruh yang diberikan guru terhadap perkembangan anak didiknya sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan negara hampir semuanya bergantung kepada guru. Untuk itulah dituntut agar guru selalu mengembangkan dirinya, tidak hanya kemampuan penguasaan materi atau ilmu pengetahuan yang menjadi konsentrasinya tetapi juga pengembangan diri dalam peningkatan profesionalismenya sebagai guru.

Guru memiliki intensitas tertinggi dalam proses interaksinya dengan peserta didik. Sehingga antara keduanya, guru dan peserta didik, terjadi proses saling mempengaruhi. Di sinilah peran guru sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan pembelajaran demokratis yang sejati yang berwawasan nilai-nilai multikultural kepada anak didiknya melalui proses pembelajaran.

Tidak hanya itu, penanaman nilai-nilai tidak cukup hanya dalam proses pembelajaran tetapi juga didukung oleh sikap dan prilaku sang pendidik dalam interaksi sosialnya baik dengan peserta didik maupun dengan orang lain di luar lingkungan formal. Sehingga citra sebagai seorang pendidik dapat selalu terjaga terutama bagi anak didiknya karena pendidik adalah model bagi anak didik.

#### **G. Nilai Demokratis dalam Pendidikan Multikultural**

Pendidikan selalu berlangsung dengan latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Seperti itulah yang terjadi di Indonesia, karena memang Negara kita kaya

akan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya adalah satu bagian dari begitu banyak fenomena perbedaan yang terjadi antara setiap individu. Dan itu wajar terjadi dan sangat manusiawi.

Sebagai unsur yang sangat sering berinteraksi dengan peserta didik, fenomena perbedaan tersebut harus dijadikan landasan dalam kegiatan pembelajarannya agar pembelajaran menjadi seimbang. Perbedaan yang ada dalam kelompok kelas anak didiknya tidak menjadikan guru menjadi berat sebelah dalam memperlakukan anak didik.

Seperti pernah disampaikan sebelumnya bahwa pendidikan multikultural (*multicultural education*) adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dalam definisi tersebut tersirat bahwa perbedaan yang ada di tengah masyarakat adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin untuk dihindari. Setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing dan tentu saja menginginkan dan mengharapkan agar kepentingan tersebut terpenuhi dengan kebebasan yang diberikan. Namun jika individu dengan bekal kebebasan yang diberikan menuntut terpenuhinya kepentingan tersebut di tengah banyaknya kepentingan orang lain maka akan terjadi benturan kepentingan antar individu. Akan tetapi jika yang terjadi adalah bahwa individu menghargai kepentingan orang lain dimana kemudian ada komunikasi dan kompromi di dalamnya maka nilai demokratis yang sejati dapat terwujud di tengah keragaman yang ada.

Menurut Nganinun Naim dan Achmad Sauqi (2010) demokratisasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan dimensi pendidikan, termasuk aspek kelembagaan. Lebih lanjut dikemukakan ciri-ciri sekolah yang demokratis: *Pertama*, sangat berorientasi normative, yakni manajemen harus selalu didasarkan pada kesepakatan. *Kedua*, organisasi sekolah harus dikelola oleh kalangan profesional, karena anak didik memerlukan pembinaan dan pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya. *Ketiga*, Penanaman nilai, kultur, dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri. *Keempat*, pengambilan keputusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh kepala sekolah. *Kelima*, semua putusan ditetapkan dengan cara

konsensus atau kompromi dan sedapat mungkin dihindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat dan pandangan.

Ciri-ciri yang dikemukakan di atas jika dikaitkan dengan pembelajaran di kelas dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaannya di kelas oleh guru. Karena pada dasarnya kelas juga merupakan satuan keorganisasian dalam kelompok kecil meskipun tidak terorganisir layaknya sebuah organisasi pada umumnya.

Oleh karena itu ketika diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran demokratis, dapat dikembangkan ciri-cirinya sebagai berikut : *Pertama*, sangat berorientasi normative, yakni pelaksanaan pembelajaran harus selalu didasarkan pada kesepakatan. *Kedua*, pembelajaran harus dilaksanakan oleh kalangan profesional, karena anak didik memerlukan pembelajaran dari mereka yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, hal ini penting agar guru tidak dianggap enteng oleh peserta didik. *Ketiga*, Penanaman nilai, kultur, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kelas dilakukan oleh seluruh anggota kelas itu sendiri melalui binaan sang guru (*modelling*). *Keempat*, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara individual oleh guru. *Kelima*, semua putusan ditetapkan dengan cara konsensus atau kompromi dan sedapat mungkin dihindari timbulnya konflik karena perbedaan pendapat dan pandangan.

Dengan ke lima ciri tersebut siswa secara tidak langsung belajar berdemokrasi dan sekaligus menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dalam dirinya melalui pembiasaan-pembiasaan dalam pembelajaran. Tentunya demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi yang sejati.

#### **H. Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural dalam Dunia Pendidikan**

Fenomena negatif yang banyak ditemukan di negeri ini terutama di kalangan pelajar karena kesalahan dalam memaknai demokrasi mendorong kita selaku praktisi pendidikan untuk segera mencari solusi agar dunia pendidikan mampu mencapai dan kembali pada tujuan yaitu mencetak generasi muda yang cerdas, yang demokratis dengan tidak mengabaikan lingkungan di sekitar mereka dan keberagaman latar belakang budaya bahkan keyakinan mereka.

Pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai perhatian yang besar dalam menumbuhkan pembelajaran yang demokratis dan berwawasan pendidikan multikultural ini, hal ini dapat kita lihat

dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai aktor terdepan dalam mencetak generasi muda, guru dituntut agar selalu mengembangkan dirinya, tidak hanya kemampuan penguasaan materi atau ilmu pengetahuan yang menjadi konsentrasinya tetapi juga pengembangan diri dalam peningkatan profesionalismenya sebagai guru, termasuk juga di dalamnya yaitu memberikan pendidikan multikultural baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siswanya dengan pertimbangan latar belakang peserta didiknya.

Jika pembelajaran berlangsung demokratis dan berwawasan multikultural mendapat apresiasi positif dan ditindaklanjuti oleh semua kalangan, niscaya generasi muda yang dicetak oleh dunia pendidikan bukan hanya generasi yang cerdas saja, akan tetapi juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang memiliki jiwa demokrasi yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia.

#### **I. Daftar Pustaka**

- Aly, Abdullah. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibie, BJ. (2006). *Detik-detik yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Azzet, Muhaimin A. (2011). *Pendidikan yang Membebaskan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Widyatama.
- Hanafiah, Nanang., Suhana, Cucu. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Herimanto & Winarno. (2011). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi. (2010). *Pendidikan Multikultural : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sulalah. (2012). *Pendidikan Multikultural : Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Yaqin, Haqqul. (2009). *Agama dan Kekerasan: Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: eLSAQ Press